

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia berimbas juga ketanah air dan perkembangannya begitu pesat dan sangat mengkhawatirkan, narkoba sudah menyebar hingga pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa terjerat narkoba.

Narkoba memang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara, hal ini dikarenakan Narkoba dikategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* :

1. Daya rusak narkoba lebih serius dibanding dengan korupsi atau terorisme.
2. Narkoba merupakan mesin pembunuh massal (*silent killer*) yang merusak sektor kesehatan (cacat otak permanen), produktivitas, daya saing, serta stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.
3. Pelakunya melibatkan jaringan yang luas, lintas negara, dan memiliki dukungan finansial yang sangat besar.
4. Penanganannya membutuhkan penanganan dan undang-undang khusus yang efektif dan memberikan efek jera.

Tantangan dan ancaman kejahatan narkoba di Indonesia :

1. Geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar diseluruh wilayah Indonesia.
2. Demografis yang sangat besar (kurang lebih 250 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba.

3. Peredaran gelap narkoba kini juga menargetkan anak-anak (regenerasi pasar).
4. Hasil penelitian setiap hari rata-rata 33 orang meninggal dunia karena narkoba.
5. Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada para penjahat narkoba.
6. Modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang (ditemukan 37 jenis narkoba baru di Indonesia)
7. Lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba.
8. Menimbulkan kerugian yang sangat besar, kerugian pertahun di Indonesia sekitar Rp 50 Trilyun, sedangkan untuk Jawa Tengah sendiri sekitar Rp 5 Trilyun.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai lembaga yang menangani penanggulangan masalah narkoba di tanah air, dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis untuk menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Narkoba tidak hanya menjadi permasalahan ditingkat nasional, di berbagai daerah provinsi besar di Indonesia masalah narkoba juga menjadi isu hangat salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi besar di Jawa diapit oleh 2 provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur serta satu provinsi Istimewa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jawa Tengah juga dibatasi langsung dengan laut dimana sebelah utara dengan Laut Jawa, dan sebelah

selatan dengan Samudera Hindia, hal ini disinyalir merupakan wilayah kerawanan peredaran gelap narkoba.

Situasi narkoba di Jawa Tengah :

1. Jumlah narkoba di Jawa Tengah mencapai lebih dari 300.000 jiwa (1,16%).
2. 59% berstatus sebagai pekerja.
3. 24% masih berstatus pelajar/mahasiswa.
4. 17% adalah pengangguran (sumber : Puslitdatin BNN bekerja sama dengan Puslitkes UI Tahun 2017)
5. Hasil ungkap kasus oleh BNNP Jateng di tahun 2018 sudah lebih dari 10,3 kg sabu.
6. Hasil ungkap kasus oleh BNNP Jateng tahun 2019 sejumlah 3,874 kg sabu, ganja 5,943 kg dan ekstasi 257 butir. **sumber : BNNP Jateng**

Kondisi permasalahan narkoba di Jawa Tengah ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah yang berada dibawah BNN RI dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN RI. BNNP Jateng mempunyai tugas : melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN RI dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi misinya yakni menjadi lembaga penggerak P4GN di wilayah Jawa Tengah yang profesional dan berintegritas dengan menyelenggarakan program P4GN yang sinergis, integratif, dan berkelanjutan menuju Jawa Tengah bersih dan bebas narkoba.

Strategi penanganan permasalahan narkoba di Jawa Tengah terbagi dalam 2 bentuk permasalahan yang ada, yakni : penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, untuk mengatasi hal ini BNNP Jateng memfokuskan pada 3 bentuk kegiatan melalui 3 Bidang yang ada di BNNP Jateng yaitu : (1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, (2) Bidang Rehabilitasi, dan (3) Bidang Pemberantasan, dengan fokus kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan ➡ membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 2) Pemberantasan ➡ mengungkap dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba.
- 3) Rehabilitasi ➡ memulihkan para pecandu narkoba dari penyakit ketergantungan/ kecanduan narkoba supaya kembali hidup sehat dan produktif di lingkungan tempat tinggalnya.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah tampil menjadi garda terdepan yang khusus menangani masalah tentang narkoba, bertolak dari hal tersebut peneliti kemudian tertarik untuk meneliti tentang salah satu aspek ilmu administrasi publik yakni Efektivitas Organisasi. Penelitian ini dikhususkan ke salah satu Bidang yang berada di BNNP Jawa Tengah yakni pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dengan berfokus pada pencegahan permasalahan narkoba di Jawa Tengah.

BNNP Jateng melalui Bidang P2M mencoba untuk menyadarkan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti: diseminasi informasi, advokasi, sosialisasi narkoba, pendekatan-pendekatan langsung ke masyarakat melalui

pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (PSM) dan Pemberdayaan Alternatif (PA), serta kegiatan penunjang yang lainnya.

Sasaran Umum dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) adalah untuk menuju terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga angka 0,05% di wilayah provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai hal ini Bidang P2M mempunyai 2 tujuan program yakni :

1. Pencegahan untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas).
2. Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

Salah satu ujung tombak yang paling penting dalam rangka memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Agenda yang dilakukan oleh Bidang P2M adalah :

1. Menambah penggiat anti narkoba dan memberdayakannya
2. Deteksi Dini Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Tes Uji Narkotika dengan tes urine baik atas permintaan sendiri (mandiri) maupun atas inisiatif BNN Provinsi Jawa Tengah (DIPA APBN).

Tabel 1.1
Penggiat Anti Narkoba yang Diberdayakan

| Tahun | Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Pemerintah | Swasta | Pendidikan | Masyarakat |
| 2018 | 9 instansi (40 orang) | 10 instansi (40 orang) | 10 instansi (40 orang) | 10 instansi (30 orang) |
| 2019 | 8 instansi (30 orang) | (Belum) | (Belum) | (Belum) |

Sumber : Bidang P2M BNNP Jateng Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, proses pemberdayaan untuk penggiat/satgas anti narkoba di wilayah Jawa Tengah mengalami kendala, yakni terjadi penurunan pada penggiat anti narkoba di instansi pemerintah dari semula berjumlah 40 orang dari 9 instansi pemerintah pada tahun 2018, turun menjadi 30 orang dari 8 instansi, ada penurunan sebanyak 10 orang penggiat dan 1 instansi pemerintah pada tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2019, pada instansi swasta, instansi pendidikan, maupun instansi masyarakat yang belum dilakukan proses pemberdayaan untuk penggiat/satgas anti narkobanya sama sekali. pada tahun 2019. Hal ini menjadi PR besar dan harus dievaluasi oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jateng.

Tabel 1.2
Tes Urine Kurun Waktu 2018-2019

| Tahun | Tes Urine | | |
|-------|----------------|--------------------------------------|--|
| | Secara Mandiri | DIPA APBN BNNP JATENG | DIPA APBN BNN |
| 2018 | 8.327 orang | 152 orang | 500 orang |
| 2019 | 1.958 orang | (tersedia alat sejumlah 148 buah) | (Tahun ini tidak/belum ada alokasi alat/anggaran dari BNN RI |

Sumber : Bidang P2M BNNP Jateng Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan tes urine yang dilakukan secara mandiri dari total 8.327 orang pada tahun 2018 menjadi hanya 1.958 orang saja pada tahun 2019. Ada penurunan sebanyak 6.369 orang yang tidak melakukan tes urine secara mandiri, disamping itu ada kendala lain yakni belum turunnya anggaran dari BNN RI sehingga menghambat proses tes urine yang dilakukan pada tahun 2019.

Tes urine secara mandiri adalah tes urine yang dibiayai oleh masing-masing orang, lembaga, atau dinas instansi baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal sesuai dengan kebutuhannya. Padahal tes urine merupakan langkah antisipatif pertama untuk bisa mengetahui apakah seseorang mengkonsumsi dan menjadi penyalahguna narkoba jenis tertentu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk Bidang P2M BNNP Jateng.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan 39 output kegiatan Diseminasi Informasi dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Diseminasi tatap muka di Auditorium RRI Semarang Tahun 2018.
2. *Talkshow* dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) bersama Kabid P2M BNN Provinsi Jawa Tengah di TVKU Semarang.
3. Senam sehat anti narkoba dalam rangka peringatan HANI 2019.
4. *Video statement* Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah dalam rangka HANI 2019.
5. Diseminasi luar ruang tahun 2018 di jembatan jalan tol Semarang-Bawen tahun 2018.
6. Diseminasi informasi melalui media cetak Tribun Jateng.
7. Diseminasi informasi melalui media online di Tribunjateng.com tahun 2018.
8. Advokasi sebanyak 46 institusi pada tahun 2018. (**Sumber:Bidang P2M**).

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan permasalahan narkoba di Jawa Tengah, adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Bidang P2M BNNP Jateng, diantaranya :

1. Pelatihan Servis AC di Kelurahan Kuningan tahun 2018
2. Pelatihan membuatik di Kelurahan Kuningan tahun 2019, **Sumber : Bidang P2M**.

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan narkoba di Jawa Tengah masih terfokus dan terpaku di area Semarang dan sekitarnya, padahal ada 26 daerah lain di Jawa Tengah yang belum mempunyai BNNKab/Kota, seperti : Brebes, Sragen, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Jepara, Karanganyar, dan lain sebagainya belum terlalu diperhatikan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas dari suatu organisasi menarik untuk dibahas guna mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan dari suatu organisasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya ditengah kondisi keterbatasan organisasi yang ada.

Peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut melalui perspektif kajian ilmu administrasi publik untuk melihat keefektifan tersebut dengan judul : **“Efektivitas Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Permasalahan Narkoba di Wilayah Jawa Tengah”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam pencegahan permasalahan narkoba di wilayah jawa tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat kondisi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dalam melaksanakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Jawa Tengah. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Masalah terjadi jika ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau ketidaksesuaian antara apa yang senyatanya ada. Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus perhatian dari peneliti adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam mencegah ancaman penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah?.
2. Apa saja aspek-aspek yang mendukung dan menghambat dari efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jateng?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam penanganan pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek yang mendukung dan menghambat efektivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dalam pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah pengetahuan tentang efektivitas organisasi publik sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

- b. Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai efektivitas organisasi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan pemahaman mengenai efektivitas organisasi.
- b. Bagi pemerintah daerah khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah agar dapat dijadikan sebagai sebuah penilaian yang logis untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
- c. Bagi masyarakat diharapkan nantinya peran dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam hal pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Tengah semakin dapat dirasakan manfaatnya untuk mencegah semakin maraknya peredaran narkoba yang dapat merusak jati diri dan moral anak bangsa khususnya di Jawa Tengah.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait efektivitas program pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba yang memiliki keterkaitan dengan proses pencegahan narkoba di wilayah Jawa Tengah yang diteliti oleh penulis. Adapun pembahasan secara rincinya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu dengan judul Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Pelajar di Kota Yogyakarta menjelaskan tentang pelaksanaannya yang sudah berjalan cukup baik. Adapun sasaran program P4GN yang dimaksud adalah keluarga, satuan pendidikan, kelompok masyarakat, dan kelompok pekerja. Untuk kegiatan P4GN yang dilakukan di kalangan pelajar adalah membentuk satgas anti narkoba, melakukan pendampingan satgas anti narkoba, dan melakukan penyuluhan bahaya narkoba.

Agen pelaksana P4GN sudah dijalankan oleh BNN Kota Yogyakarta sebagai Leading Sector yang berkompeten dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, BNN Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Resnarkoba Polresta Yogyakarta dan beberapa LSM.

Pelaksanaan P4GN yang dilakukan oleh BNN Kota Yogyakarta menemui beberapa kendala, diantaranya : (a) Belum adanya anggaran tersendiri dari pihak sekolah untuk pelaksanaan P4GN di lingkup internal sekolah; (b) Belum adanya peraturan yang mengatur tentang pembentukan satgas anti narkoba membuat banyak sekolah di Kota Yogyakarta yang belum memiliki satgas anti narkoba; (c) Belum adanya petunjuk pelaksanaan tentang P4GN di sekolah membuat pelaksanaan program P4GN ini berjalan kurang maksimal.

2. Pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN di Provinsi Lampung tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan adanya penurunan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung. Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Grindle, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan P4GN di Provinsi Lampung juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Pelaksanaan implelementasi ini bisa dilihat dari beberapa indikator, diantaranya : (a) Tujuan implementasi kebijakan ini adalah untuk memutus rantai jaringan narkoba yang ada. Sasaran dari kebijakan ini adalah seluruh lapisan masyarakat, karena permasalahan narkoba bukan hanya golongan anak muda dan tua saja sebab penyalahgunaan narkoba tidak memilih pada batasan usia, jenis kelamin, maupun status sosial tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung.

(b) Kebijakan P4GN ini merupakan kebijakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan bahaya narkoba; (c) Perubahan yang diinginkan oleh BNN Provinsi Lampung atas pelaksanaan kebijakan ini di Provinsi Lampung adalah zero untuk pemakaian narkoba, namun pada kenyataannya hal ini belum berhasil dilakukan oleh BNN karena sampai saat ini jumlah penyalahguna narkoba semakin meningkat.

(d) Sumberdaya yang ada di BNN Prov Lampung belum memadai, baik dari segi manusia maupun finansial. Jika dilihat dari sumberdaya manusianya BNN hanya memiliki 52 orang, dan jumlah tersebut tidak akan cukup untuk melaksanakan tugas seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung yang tidak sedikit.

Padahal idealnya jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah minimal 100 orang dari BNN. Selanjutnya terkait sumberdaya finansial, peneliti melihat bahwa di BNN Provinsi Lampung sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai, ditambah lagi dengan BNN Provinsi Lampung yang belum memiliki gedung tetap.

(e) BNN merupakan badan yang fokus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, akan tetapi semua elemen juga harus saling membantu dalam mensukseskan kebijakan ini, semua harus bahu membahu untuk menyatakan perang terhadap narkoba karena tidak akan cukup hanya dengan BNN Provinsi Lampung yang menjalankan kebijakan ini.

3. Berdasarkan hasil penelitian Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang oleh BNNP Jawa Tengah dapat di simpulkan bahwa dari sudut pandang mahasiswa ternyata strategi pencegahan yang dilakukan BNNP Jateng masih kurang maksimal, sehingga para aktivis anti narkoba di kampus bahkan merasa belum bisa merasakan peran BNN.

Hal ini disebabkan karena BNNP Jateng tidak memiliki program khusus atau departemen yang terfokus pada mahasiswa saja melainkan lebih kepada masyarakat umum secara luas. Dengan keterbatasan anggaran dana dan sumberdaya manusia, BNNP Jateng justru kurang melakukan bimbingan kepada para mahasiswa aktivis anti narkoba sama seperti temuan yang peneliti temukan saat penelitian di Sekolah, yang padahal seharusnya dapat BNNP manfaatkan sebagai suksesor strategi P4GN dengan melatih dan membimbing pada siswa dan mahasiswa supaya dapat menjadi kepanjangan tangan dari BNN di lingkungannya.

Gagasan strategi P4GN sebenarnya cukup bagus yaitu bertujuan menginformasikan ke masyarakat tentang bahaya narkoba dan ajakan untuk melakukan pola hidup sehat tanpa narkoba, namun cakupannya masih relatif sempit sebagaimana contoh audiensi yang pernah dilakukan di Undip justru hanya mengundang ketua-ketua UKM dan anggota organisasi Peduli Napza sehingga sasarannya kurang luas dan kurang berdampak masif.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan para mahasiswa Peduli Napza (UKM Peduli Napza) sangat baik dan patut di apresiasi. Dengan program-program yang mereka miliki yaitu kaderisasi, diklat, pendampingan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, pemasangan poster anti narkoba, kontes membuat poster, orasi peringatan hari besar anti narkoba, dan kunjungan ke tempat-tempat rehab.

Peneliti menyarankan sebaiknya pihak Universitas dapat membantu mensukseskan dengan pemberian dana yang cukup dan lancar supaya setiap

program yang telah UKM Peduli Napza gagasan dan rencanakan dapat berjalan sesuai harapan. Demikian juga dengan BNNP Jateng sebaiknya memberikan pelatihan dan bimbingan yang lebih intensif dan berkelanjutan jika ingin memaksimalkan strategi P4GN pada kalangan mahasiswa agar dapat berdampak masif.

Fakta-fakta yang peneliti temukan dilapangan, terbukti bahwa masih ada ketidaksesuaian atau belum berjalannya strategi P4GN secara maksimal, sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi dan fenomena penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa yang masih relatif tinggi.

Peneliti memberikan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi program P4GN secara menyeluruh dari tingkat perencanaan sampai pelaksanaan supaya strategi P4GN yang dicanangkan Pemerintah melalui BNN dapat berjalan efektif dan memberi dampak yang signifikan.

Dibawah ini adalah tabel penelitian terdahulu di mana di atas sudah dijelaskan dan dijabarkan, maka penulis membuat tabel supaya pembaca dapat lebih mudah memahami perbandingan penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 1.3
Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Penulis Tahun | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|----------------------|--|
| 1. | Nosa Nanda Dewanta ra, 2016 | Mengetahui pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan pelajar di kota Yogyakarta | Metode Deskriptif | Pelaksanaan program P4GN di kalangan pelajar di kota Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik walau terdapat berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya. Sasaran program P4GN adalah keluarga, satuan pendidikan, kelompok masyarakat, dan kelompok pekerja. Untuk kegiatan P4GN yang dilakukan di kalangan pelajar adalah membentuk satgas anti narkoba, melakukan pendampingan satgas anti |

| | | | | |
|----|--------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | narkoba, dan melakukan penyuluhan bahaya narkoba. |
| 2. | Nadiril Syah, 2016 | Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung | Kualitatif Deskriptif | Pelaksanaan kebijakan P4GN di provinsi Lampung tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Lampung. Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Grindle, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan P4GN di provinsi Lampung tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. |
| 3. | Gideon Heru Sukoco, 2017 | Mengetahui bagaimana strategi pencegahan, pemberantasan | Kulitatif, Deskriptif - Analisis | Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang mahasiswa ternyata strategi pencegahan yang dilakukan oleh BNNP |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | , dan rehabilitasi penyalahguna narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Semarang yang dirancang oleh BNNP Jateng | Jateng masih kurang maksimal, sehingga para aktivis anti narkoba di kampus bahkan belum bisa merasakan peran BNN, sama seperti temuan yang peneliti temukan saat penelitian di sekolah, yang padahal seharusnya dapat BNNP Jateng memanfaatkan sebagai suksesor strategi P4GN dengan melatih dan membimbing pada siswa dan mahasiswa supaya dapat menjadi kepanjangan tangan dari BNN di lingkungannya. |
|--|--|--|---|

(Sumber : kumpulan penelitian yang diolah)

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi berasal dari kata *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi.

Prajudi Atmosudirjo (1982 dalam Inu Kencana 2006:24) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Edward H. Litchfield (1959 dalam Inu Kencana 2006:25), administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakan, dan dipimpin.

Berdasar beberapa definsisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Pasolong, 2011:8).

Pencapaian tujuan administrasi publik seperti pengertian administrasi publik yang dikemukakan para ahli, maka dapat dikatakan peran administrasi publik dalam suatu negara sangatlah penting. Peran administrasi publik menurut Denhardt (2003 dalam Pasolong 2007:18) adalah administrasi publik melalui pelayanan-pelayanan publik dapat menciptakan demokrasi.

Peran administrasi publik pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Oleh karenanya setiap kegiatan dalam administrasi publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output.

Ruang lingkup administrasi publik sangat luas mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama yang memiliki obyek materialnya Negara, antara lain : ilmu pemerintahan, ilmu politik, hukum tata negara, dan ilmu negara sendiri, serta ilmu filsafat yang menjadi sumber keilmuan. Sementara salah satu unsur administrasi publik adalah manajemen.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan administrasi publik diikuti pula dengan perkembangan paradigmanya. Nicolas Hendry (1988 dalam Pasolong 2007) mengemukakan lima paradigma administrasi publik. Paradigma pertama adalah Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926).

Fokus dari ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan, sedangkan masalah-masalah pemerintah, politik dan kebijaksanaan merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi negara ini berada.

Paradigma ke dua adalah Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937). Lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dengan paradigma ini, yang paling penting fokusnya yakni prinsip-prinsip administrasi yang dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya.

Paradigma ketiga, Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Pada masa itu (1950-1970), secara singkat dijelaskan bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Paradigma keempat, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970). Pada masa itu (1954-1970), administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi.

Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan focus, tetapi tidak pada locusnya.

Paradigma kelima, Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara. Masa ini terjadi setelah tahun 1970. Masa ini, administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik.

Pada tahun 1992 di Amerika Serikat muncul paradigma yang sangat terkenal karena bersifat reformatif yaitu "*Reinventing Government*" yang disampaikan oleh D. Osborne dan T. Gaebler (1992) dan kemudian dioperasionalisasikan oleh Osborne dan Plastrik (1997). Di dalam paradigma ini pemerintah harus bersifat katalitik, memberdayakan masyarakat, mendorong semangat kompetisi, berorientasi pada misi, mementingkan hasil dan bukan cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, berjiwa wirausaha, selalu berupaya dalam

mencegah masalah atau bersikap antisipatif, bersifat desentralistis, dan berorientasi pada pasar.

Paradigma ini dikenal dengan nama *New Public Management* (NPM) di Inggris. Paradigma NPM ini melihat bahwa paradigma terdahulu yaitu administrasi klasik kurang efektif dalam memecahkan masalah dan dalam memberikan pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. Hood (Vigoda, 2003:813) mengungkapkan bahwa ada tujuh komponen doktrin dalam NPM, yaitu :

- 1) Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik.
- 2) Penggunaan indikator kerja.
- 3) Penekanan yang lebih besar pada kontrol output.
- 4) Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil.
- 5) Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi.
- 6) Penekanan gaya ke sektor swasta pada praktek manajemen, dan
- 7) Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya.

Di tahun 2003, atau kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian muncul lagi paradigma baru yang oleh J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt (2003) diberi nama *New Public Service* (NPS). Kedua tokoh ini menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan *Reinventing Government* atau NPM, dan beralih ke prinsip *New Public Service*. Menurut Denhardt & Denhardt (2003;2-43), administrasi publik harus :

- 1) Melayani warga masyarakat bukan pelanggan (*serve citizen, not customers*).
- 2) Mengutamakan kepentingan publik (*seek the public interest*).
- 3) Lebih menghargai kewarganegaraan daripada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*).
- 4) Berpikir strategis, dan bertindak demokratis (*think strategically, act democratically*).
- 5) Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan suatu yang mudah (*recognize that accountability is not simple*).
- 6) Melayani daripada mengendalikan (*serve rather than steer*), dan
- 7) Menghargai orang, bukannya produktivitas semata (*value people, not just productivity*). (Dalam Keban, 2008:35-37).

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Subarsono;2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa : (1) Kebijakan Publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.

(2) Kebijakan Publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada *status quo*, misalnya tidak menunaikan sebuah pajak adalah sebuah kebijakan.

1.5.4 Manajemen Publik

Overman dalam (Keban,2004: 85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific management*” meskipun sangat dipengaruhi “*scientific management*”. Manajemen publik bukanlah “*policy analysis*”, bukan juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi “*rational-instrumental*” pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain.

Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain.

Berdasarkan pandangan Overman mengenai manajemen publik kemudian OTT, Hyde dan Shafritz 1991 (dalam Pasolong 2007:83), mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang tumpang tindih.

Perbedaannya bila kebijakan publik merefleksikan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik merepresentasikan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah dari kebijakan publik.

Wilson (dalam Pasolong 2007:96) meletakkan empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewakili manajemen publik, yaitu (1) pemerintah sebagai seting utama organisasi, (2) fungsi eksekutif sebagai focus utama, (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci

pengembangan kompetensi administrasi, (4) metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik.

1.5.5 Manajemen

Manajemen merupakan salah satu bagian yang terdapat pada disiplin ilmu administrasi publik. Berbagai teori dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang ikut serta dalam disiplin ilmu manajemen maupun administrasi publik.

Menurut Stoner (Hani Handoko, 2011:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Henri Fayol (Heene, 2010:8) menyebutkan bahwa manajemen merupakan serangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas tersebut telah diurai dalam urutan fungsi-fungsi spesifik, antara lain :

- 1) Perencanaan.
- 2) Pengorganisasian.
- 3) Kepemimpinan, dan
- 4) Pengendalian.

George R Terry mengemukakan, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. George R Terry menjelaskan terdapat empat fungsi manajemen, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran kebijakan, prosedur, program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien .

4) Pengendalian (*Controlling*)

Bagian terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*). Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Pengendalian dapat dirumuskan sebagai

proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

1.5.5.1 Unsur-Unsur Manajemen

Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen membutuhkan sarana yang disebut dengan unsur manajemen. Menurut Harrington Emerson (dalam Herujito, 2004:6) manajemen mempunyai 5 unsur (5M), yaitu :

- 1) *Men*, merujuk pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, dalam manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan.
- 2) *Money*, uang atau modal pembiayaan merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.
- 3) *Materials*, meliputi bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 4) *Machines*, alat alat yang dibutuhkan untuk mempercepat proses produksi maupun untuk mencapai tujuan.
- 5) *Methods*, teknis atau teknik mengerjakan kegiatan organisasi.

Berdasar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah upaya-upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kinerja publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Efektivitas digunakan sebagai suatu ukuran apakah target dan tujuan pemerintah yang telah ditetapkan

dalam proses manajemen telah tercapai dengan tepat atau tidak, sehingga memberikan dampak pelayanan terhadap masyarakat.

1.5.6 Efektivitas

1.5.6.1 Pengertian Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009) kata efektif diartikan sebagai dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Robbins (dalam Tika P, 2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Steers (1985:87) mengemukakan bahwa : “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumberdaya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Berdasar beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas adalah hubungan antara

output dan tujuan, sesuatu dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

1.5.7 Organisasi

James D. Mooney 1954 (dalam Inu Kencana Syafii, 2006: 51), mengungkapkan organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Herbert A. Simon 1958 (dalam Inu Kencana Syafii, 2006: 51), juga berpendapat bahwa organisasi sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam satu kelompok orang-orang.

Milles 1975 (dalam Tangkilisan 2005:132) mendefinisikan organisasi tidak lebih daripada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah masukan-masukan dari lingkungannya menjadi barang atau jasa-jasa yang dapat dipasarkan. Anderson dan Parker 1964 (dalam Sukidin Damai Darmadi 2011:196) mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan individu yang memenuhi kepentingan orientasi nilai.

Memahami organisasi secara lebih mendalam, kita dapat melihat organisasi dari beberapa sudut pandang seperti yang dikemukakan Tangkilisan (2007:133), sebagai berikut :

1. Organisasi sebagai wadah

Organisasi merupakan tempat beraktivitas, yakni kegiatan administrasi dan manajemen. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, serta hubungan dan tata kerjanya.

2. Organisasi sebagai suatu proses pembagian kerja

Pembagian kerja dalam suatu pekerjaan yang dilakukan akan memungkinkan terjadinya hubungan kerja sama yang formal sesuai dengan yang telah ditetapkan, bahkan dengan adanya pembagian kerja akan membentuk hubungan informal antar individu.

3. Organisasi merupakan suatu alat dalam mencapai tujuan dan sangat diperlukan oleh masyarakat

Tujuan organisasi akan tercapai bilamana tiap-tiap individu yang ada dalam organisasi sadar akan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Sektor publik dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam menyediakan barang atau jasa. Organisasi sektor publik dalam menghadapi globalisasi dituntut untuk selalu melakukan pengembangan pendekatan, untuk itu perlu adanya kerjasama pemerintah baik dengan swasta dan masyarakat guna mewujudkan *good governance*.

Organisasi dalam menjalankan peran dan fungsinya juga dituntut untuk selalu dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas, pelayanan dan kontribusi yang dimaksudkan merupakan salah satu tujuan utama dalam organisasi, dan untuk mencapai tujuan tersebut organisasi harus memaksimalkan sumberdaya yang ada dengan sebaik-baiknya secara efektif dan juga efisien.

1.5.8 Efektivitas Organisasi

Schein (1980) dalam bukunya *organizational psychology* mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara dan tumbuh, lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya (Uha, 2013:187).

Efektivitas organisasi adalah pengertian tujuan dan pencapaian tujuan. Individu dianggap menggabungkan diri dalam organisasi dengan maksud mencapai tujuan pribadi mereka (seperti : penghasilan, status, dan pekerjaan yang berarti) secara lebih baik. Demikian pula organisasi dipandang sebagai kesatuan mengejar sasaran khusus keseluruhan organisasi (misalnya : laba, pertumbuhan, dan produktivitas).

Memang secara umum telah dikemukakan bahwa efektivitas itu sendiri paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usahanya mengejar tujuan yang telah ditentukan organisasi tersebut.

Etzioni (dalam Torang, 2014:99) menggambarkan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam Sutopo (2012:51) keefektifan organisasi adalah ketepatan sasaran suatu proses yang terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerja sama dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai tujuan.

Berdasar beberapa definisi efektivitas organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan didirikannya suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan efektif dan efisien. Selain itu dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab, maka pencapaian tujuan dari organisasi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan hasil yang baik. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan.

1.5.8.1 Segi Segi Efektivitas

Beberapa analisis organisasi berusaha mengidentifikasi segi-segi yang lebih menonjol yang berhubungan dengan konsep ini. Walaupun ada deretan panjang kriteria evaluasi yang dipakai, namun kriteria yang paling banyak dipakai meliputi yang berikut ini :

- 1) Kemampuan menyesuaikan diri.
- 2) Produktivitas.

- 3) Kepuasan kerja.
- 4) Kemampuan ber laba.
- 5) Pencarian sumber daya.

Variabel-variabel sedemikian ini telah diidentifikasi dengan berbagai alternatif yaitu sebagai alat pengukur efektivitas itu sendiri dan sebagai variabel yang memperlancar atau membantu memperbesar kemungkinan tercapainya efektivitas. Price, 1968 (dalam Steers, 1985:2006).

1.5.8.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukan suatu hal yang sederhana, karena keefektifan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan ketergantungan pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat, maka dapat menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan yang efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian (1978:77), sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya anggota organisasi dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan bagaimana sekarang dan apa yang hendak dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya suatu sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria keefektifan dapat dinyatakan dalam ukuran waktu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Buku Gibson *et al.*, (1996: 50), Tampubolon (2008: 177-179) mengemukakan kriteria efektivitas organisasi, diantaranya adalah : produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan kelangsungan hidup.

- 1) Produksi

Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.

Produksi yang dimaksud dalam organisasi publik tentang bagaimana organisasi mampu memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dengan memberikan kontribusi yang nyata melalui program-program kerja yang dapat dirasakan manfaat sepenuhnya oleh masyarakat.

2) Efisiensi

Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya perorang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

Efisiensi dalam organisasi publik diartikan sebagai penggunaan sumberdaya yang ada dengan semaksimal mungkin tanpa harus terebebani oleh keterbatasan yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi.

3) Kepuasan

Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.

4) Keadaptasian

Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, dan kualitas produk. Sedangkan untuk perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

5) Kelangsungan hidup

Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu pada tanggung jawab organisasi dalam memeperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Berdasar sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 1985:53), yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam menentukan sebuah tujuan yang harus mengandung unsur-unsur *SMART* (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*).

Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, sebuah tujuan harus dapat dipahami atau jelas memiliki hasil yang dapat diukur, terdapat target, memiliki sumber daya yang mendukung, dan memiliki periode tertentu.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dan komunikasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Namun, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

1.6 Operasionalisasi Konsep/Fenomena Pengamatan

Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah suatu cara untuk mengukur sejauhmana Efektivitas Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh BNNP Jateng.

Fenomena yang akan diteliti oleh peneliti mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

Efektivitas Pencegahan BNNP Jateng Dalam Penanganan Permasalahan Narkoba di Wilayah Jawa Tengah dapat dilihat dari :

1. Pencapaian Tujuan

Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Pelaksanaan program cegah narkoba dan dayamas yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jateng mempunyai 2 tujuan utama yakni :

- a. Pencegahan untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas) dengan menekan angka prevalensi penyalahguna narkoba hingga angka 0,05%.
- b. Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

Tujuan tersebut diimplementasikan dalam 39 output kegiatan diseminasi informasi dan dua pelatihan pemberdayaan masyarakat, kegiatannya :

- 1) Diseminasi tatap muka di Auditorium RRI Semarang tahun 2018.
- 2) Senam sehat anti narkoba dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2019.
- 3) Diseminasi informasi melalui media cetak Tribun Jateng.
- 4) Talkshow narkoba bersama Kabid P2M di TVKU Semarang.
- 5) Pelatihan servis AC di Kelurahan Kuningan tahun 2018.
- 6) Pelatihan membuat batik di Kelurahan Kuningan tahun 2019, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Bidang P2M.

Berkaca dari program cegah narkoba dan dayamas yang dilakukan oleh Bidang P2M selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat selama ini belum begitu efektif. Hal ini bisa dilihat dari fokus tempat yang disasar diseminasi informasi,

advokasi, sosialisasi narkoba, dan pelatihan *life skills* masih berkisar di daerah Semarang dan sekitarnya.

Hal ini dapat dimaklumi karena kurangnya dukungan dari BNNKab/Kota yang ada di Jawa Tengah, baru ada sekitar 9 satuan kerja (satker) dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jateng sedangkan ruang lingkup kerja BNNP Jateng sangatlah luas mencakup satu provinsi. Belum lagi ditambah minimnya jumlah personil BNN se Jateng yang berjumlah 347 orang dari jumlah idealnya sekitar 814 orang.

Tes urine mandiri pada tahun 2018 menyasar 8.327 orang, sedangkan tahun 2019 justru hanya menyasar 1.958 orang turun sebanyak 6.369 orang, padahal tes urine merupakan langkah antisipatif pertama untuk bisa mengetahui apakah seseorang menjadi penyalahguna dan mengkonsumsi narkoba jenis tertentu atau tidak.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari BNNP Jateng dan Pemerintah Daerah Jateng beserta jajarannya, selain itu dukungan dari warga masyarakat Jateng juga sangat diperlukan karena narkoba memang musuh kita bersama. Dengan langkah-langkah seperti ini, bisa dipastikan angka prevalensi narkoba di Jateng bisa terkendali sampai menyentuh angka 0,05% sesuai dengan tujuan dari Bidang P2M BNNP Jateng.

2. Integrasi

Keterlibatan organisasi lain dalam pelaksanaan serta koordinasi yang dilakukan oleh organisasi. Proses integrasi dalam rangka pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bidang P2M BNNP Jateng sangatlah penting.

Hal ini bertujuan untuk menjalin komunikasi, koordinasi, dan jejaring kerja dengan *stakeholder* dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat anti narkoba, sehingga dapat meningkatkan kemandirian kegiatan P4GN di wilayah Jawa Tengah, dengan tujuan :

- a. Semakin meningkatnya masyarakat yang menjadi penggiat anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan.
- b. Terselenggaranya pemberdayaan dalam upaya P4GN di lingkungan kerja instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam menerapkan program P4GN.
- c. Terbangunnya sinergitas antara BNN dengan para stakeholder yang berada di lingkungan kerja instansi pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan.

Tabel Penggiat Anti Narkoba yang Diberdayakan

| Tahun | Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Pemerintah | Swasta | Pendidikan | Masyarakat |
| 2018 | 9 instansi (40 orang) | 10 instansi (40 orang) | 10 instansi (40 orang) | 10 instansi (30 orang) |
| 2019 | 8 instansi (30 orang) | (Belum) | (Belum) | (Belum) |

Sumber : Bidang P2M BNNP Jateng Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, proses pemberdayaan untuk penggiat/satgas anti narkoba di wilayah Jawa Tengah mengalami kendala, yakni terjadi penurunan pada penggiat anti narkoba di instansi pemerintah dari semula berjumlah 40 orang dari 9 instansi pemerintah pada tahun 2018, turun menjadi 30 orang dari 8 instansi, ada penurunan sebanyak 10 orang penggiat dan 1 instansi pemerintah pada tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2019, pada instansi swasta, instansi pendidikan, maupun instansi masyarakat yang belum dilakukan proses pemberdayaan untuk penggiat/satgas anti narkobanya sama sekali. pada tahun 2019. Hal ini menjadi PR besar dan harus dievaluasi oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jateng.

Kendala penurunan ini pastilah sangat berpengaruh pada langkah pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bidang P2M, oleh karena itu perlu dilakukan penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba serta mengefektifkan rapat sinergitas untuk penguatan pelaksanaan P4GN di Jateng

dengan instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, dan masyarakat Jateng tentunya.

3. Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan dari dalam Bidang P2M BNNP Jateng dan lingkungan di luar Bidang P2M sangatlah berpengaruh dalam proses pencegahan narkoba dan pemberdayaan masyarakat yang ada. Pelaksanaan kegiatan yang ada kurang didukung oleh beberapa aspek, dari dalam Bidang P2M terkendala oleh :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penyuluhan narkoba dan pemberdayaan masyarakat daerah rawan narkoba
- b. Terbatasnya regulasi tentang P4GN untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga sulit untuk masuk pada pemetaan kawasan rawan dan rentan narkoba secara mandiri.

Dari luar Bidang P2M terkendala oleh aspek berikut ini :

- a. Belum semua instansi/lembaga menyadari bahwa masalah narkoba merupakan masalah bersama yang sangat perlu ditemukan solusinya.
- b. Masih sedikitnya tempat-tempat pelatihan bagi para mantan pengedar dan pecandu narkoba, sehingga mereka kurang berdaya dan tidak bisa menghasilkan uang untuk menunjang kehidupan mereka masing-masing.

Data yang diperoleh peneliti, pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 hanya dilakukan 2 kegiatan pelatihan *life skill* bekerjasama dengan dinas sosial dan kelurahan setempat, kegiatan yang dilakukan yaitu :

- 1) Pelatihan servis AC di Kelurahan Kuningan tahun 2018.
- 2) Pelatihan membuat batik di Kelurahan Kuningan pada tahun 2019.

Berdasar penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Bidang P2M dalam pencegahan narkoba di wilayah Jawa Tengah. Para mantan pengedar dan penyalahguna harus diberikan ruang lebih untuk bisa berkarya dan lepas dari dunia bisnis haram narkoba.

Sarana prasarana yang ada di Bidang P2M harus ditambah dan diperbanyak, semisal dengan menambah : jumlah personel, menambah mobil cegah dan truk tes urine, serta menambah dan mendirikan tempat-tempat pelatihan baru berbasis UMKM kreatif, karena yang ada sekarang ini jumlahnya memang sangat terbatas.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah salah satu cara untuk mencari jawaban permasalahan-permasalahan atas suatu permasalahan, sedangkan jawaban permasalahan tersebut berupa data-data hasil penelitian yang didapat dari penggunaan metode-metode tertentu.

Metode penelitian ini berfungsi sebagai alat bantu penelitian dalam memberikan suatu penafsiran terhadap suatu permasalahan yang dihadapi seorang peneliti. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang meliputi beberapa aspek.

1.7.1 Desain penelitian

Menurut desainnya, metode penelitian kualitatif berciri-ciri umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Nasution 1992 (dalam Andi Prastowo, 2012:41) berpandangan bahwa dalam metode penelitian kualitatif pada awalnya desain penelitian belum dapat direncanakan secara terperinci, lengkap dan pasti yang menjadi pegangan selanjutnya selama penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif tipe deskriptif.

Pada tipe deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Data laporan penelitian tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Hal itu hendak dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu. Pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Penelitian kualitatif tipe deskriptif yang penulis gunakan melalui pandangan fenomenologi, fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Pada hal ini, para fenomenologis ingin memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain.

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti, yang ditekankan oleh kaum fenomenologis ialah aspek subjektif dari perilaku orang.

Mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Para fenomenolog percaya bahwa pada makhluk hidup tersedia pelbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi

dengan orang lain, dan bahwa pengertian pengalaman kitalah yang membentuk kenyataan.

Penelitian kualitatif cenderung berorientasi fenomenologis, namun sebagian besar di antaranya tidak radikal, tetapi idealis pandangannya. Mereka memberi tekanan pada segi subjektif, tetapi mereka tidak perlu mendesak atau bertentangan dengan pandangan orang yang mampu menolak tindakan itu.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs berkaitan dengan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini memiliki fokus kajian yang akan diteliti adalah tentang Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan P4GN (Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) di wilayah Jawa Tengah.

Di dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Jawa Tengah dengan mengambil fokus sampel pada salah satu bidangnya yakni Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Adanya pembatasan lokasi dalam penelitian yang dilaksanakan bertujuan agar peneliti dapat lebih mudah dalam mengamati masalah atau fenomena yang ada secara lebih mendalam.

1.7.3 Instrumen penelitian

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus di validasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya, yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Penelitian merupakan pusat dan kunci data yang paling menentukan dalam penelitian kualitatif (Afifudin, 2009 : 125). Dalam penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian subyek penelitian ini karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012:222). Hal Tersebut dapat dipahami bahwa, dalam

penelitian kualitatif pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri.

1.7.4 Subjek penelitian

Pada penelitian kualitatif ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informan memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut. Istilah lain adalah partisipan.

Partisipan digunakan, terutama apabila subjek-subjek mewakili suatu kelompok tertentu dan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Kedua istilah tersebut secara substansial dipandang sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2007: 132).

Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat menambahkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti. Peneliti juga menentukan informan yang akan dijadikan pedoman nantinya :

- 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Kepala Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsis Jawa Tengah.

- 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional
Provinsi Jawa Tengah.

1.7.5 Teknik Pemilihan Informan

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh Sugiyono (2007:52) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.

Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sementara, hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat ditransfer atau diterapkan ke situasi sosial (tempat lain) apabila situasi sosial yang diteliti tidak memungkinkan.

Cara yang bisa ditempuh untuk menemukan informan dalam penelitian ini penulis memiliki dua langkah yaitu :

- 1) Melalui keterangan orang yang berwenang

Cara pertama ini bisa dilakukan dengan formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat dan lain sebagainya).

- 2) Melalui wawancara pendahuluan

Informan dalam penelitian kedudukannya sangat penting bagi peneliti. Adapun persyaratan tertentu yang harus mereka miliki untuk layak ditetapkan sebagai informan peneliti. Moleong 2006 (dalam Andi Prastowo,

2012:196) menyebutkan bahwa ada 5 persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang agar layak dijadikan informan yaitu :

- a. Orang tersebut harus jujur dan bisa dipercaya.
- b. Orang tersebut memiliki kepatuhan pada peraturan.
- c. Orangnyanya suka bicara, bukan orang yang sukar bicara apalagi pendiam.
- d. Orang tersebut bukan termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian.
- e. Orang yang memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.
- f. Dalam wawancara ini, peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang telah dijelaskan diatas.

1.7.6 Jenis dan sumber data

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Seperti diterangkan Nasution (dalam Andi Prastowo, 2012:43), dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.

Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistik meskipun tidak menolak data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini yaitu berupa :

a. Data Primer

Data primer adalah responden, dimana peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari sumbernya. Sumber dari data primer dalam penelitian adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan dan observasi langsung ke objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat mendukung pembahasan. Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder seperti laporan-laporan, data dokumentasi, buku, majalah dan jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, dan cara paling mudah, tepat dan sistematis, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Pada dasarnya dalam penelitian ada banyak teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, namun yang digunakan hanya beberapa saja. Dalam upaya untuk mengumpulkan data yang relevan maka cara yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi, studi pustaka.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui :

- a) Wawancara, dilakukan secara *face to face* terhadap responden, dimaksudkan untuk mencari fakta-fakta atau informasi yang belum terungkap sehingga suatu fenomena sosial dapat dipahami. Mendapatkan informasi melalui tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang sengaja dipilih dengan maksud agar memberikan informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- b) Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data setiap bahan tertulis. Pada dasarnya dokumen sebagai sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan atau bahkan meramalkan. Dokumen yang dimanfaatkan dapat berasal dari mana saja sepanjang berhubungan dengan fokus penelitian., berupa arsip-arsip dan laporan pada pemerintah terkait.
- c) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat dan terdengar mengenai objek penelitian.
- d) Studi Pustaka, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari literatur dan buku yang relevan dari penelitian.

1.7.8 Pengolahan Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan 3 tahapan berikut :

1. Editing

Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk

memperhalus data, selanjutnya adalah perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menterjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip rekaman wawancara, adalah proses penghalusan.

2. Klasifikasi

Pada tahap ini mencoba menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapat tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Memberi kode

Tahapan ini kita melakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya) serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan tujuannya agar memudahkan kita menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outline* laporan.

1.7.9 Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih indah dan diinterpretasikan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008:244).

Moleong 2007 (dalam Andi Prastowo 2012:238) menjelaskan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dengan kata lain analisis data berlangsung sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan pada selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain. Analisis domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan setelah melalui suatu proses dari terjun ke objek penelitian yang berupa situasi sosial (*place, actor, dan activity*). Analisis ini pada umumnya dilaksanakan untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh tentang situasi sosial (objek penelitian) yang kita teliti.

Teknik untuk mendapatkan datanya adalah dengan *grand tour* dan *mini tour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui. Selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti

selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian yang perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data lapangan.

Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak, oleh karena itu diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi. Secara singkat dalam penelitian ini, proses analisis terdapat tata cara /alur kegiatan sebagai berikut:

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.

Pada penelitian ini data yang diperoleh di lapangan disusun berdasarkan hal-hal yang pokok dan berhubungan dengan pokok masalah. Setelah itu laporan direduksi, dirangkum, dipilah-pilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya.

b) Penyajian data

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Melihat penyajian-penyajian akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang di dapatkan dari penyajian-penyajian tersebut. Tampilan data (data display) dipergunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

c) Menarik kesimpulan/ verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam kegiatan analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (2007) dalam (Andi Prastowo 2012:248) mengungkapkan bahwa untuk langkah ketiga ini peneliti mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau justru gelap sehingga setelah diselidiki menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.7.9.10 Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti.

Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada, untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* dengan fakta dari informan yang berbeda dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan, triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan observasi. Keterbatasan lain adalah data yang disajikan oleh peneliti yang masih kurang, hal itu disebabkan karena sulitnya akses untuk mendapatkan data tersebut.